



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

KABAG HUKUM	KASUBSAG
f	Ca

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	Uk

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 275);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Tahun 2020 Nomor 279).
28. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 305) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 347);
29. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 309);
30. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 459);



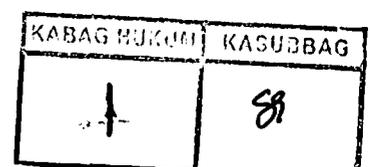
31. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 472);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2020, terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 66.064.355.509,29	
2. Dana Perimbangan	Rp. 729.018.572.192,00	
3. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp. 195.555.558.852,77</u>	
Jumlah Pendapatan		<u>Rp. 990.638.486.554,06</u>
b. Belanja Daerah		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp. 348.256.061.727,00	
b) Belanja Bunga	Rp. -	
c) Belanja Hibah	Rp. 2.670.000.000,00	
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.670.000.000,00	
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 162.284.854.905,68	
f) Belanja Tidak Terduga	Rp. 21.915.341.823,00	
		<u>Rp. 543.093.588.455,68</u>
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp. 71.632.026.503,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 150.831.954.734,43	
c) Belanja Modal	<u>Rp. 175.845.414.515,00</u>	
		<u>Rp. 398.309.395.752,43</u>
Jumlah Belanja		<u>Rp. 941.402.984.208,11</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. (1.932.041.470.762,17)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 37.361.479.042,33	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 11.548.200.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		<u>Rp. 25.813.279.042,33</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		<u>Rp. 75.048.781.388,28</u>



**Pasal 2**

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 30 Agustus 2021

**BUPATI GUNUNG MAS,**

TTD

**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 30 Agustus 2021

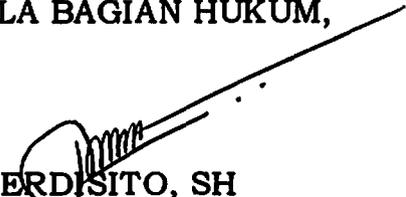
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

**YANSITERSON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR 564**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ERDISITO, SH**  
NIP. 19700617 200501 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	974.374.436.073,91	990.638.486.554,06	16.264.050.480,15	101,67
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	45.865.970.000,00	66.064.355.509,29	20.198.385.509,29	144,04
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.644.500.000,00	31.303.502.703,00	17.659.002.703,00	229,42
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.222.430.000,00	3.821.073.945,50	598.643.945,50	118,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.524.000.000,00	7.738.215.980,00	214.215.980,00	102,85
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.475.040.000,00	23.201.562.880,79	1.726.522.880,79	108,04
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	739.235.277.798,22	729.018.572.192,00	(10.216.705.606,22)	98,62
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	74.065.708.266,22	65.960.501.701,00	(8.105.206.565,22)	89,06
1.2.2	Dana Alokasi Umum	520.224.021.000,00	518.013.421.000,00	(2.210.600.000,00)	99,58
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	144.945.548.532,00	145.044.649.491,00	99.100.959,00	100,07
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	189.273.188.275,69	195.555.558.852,77	6.282.370.577,08	103,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.175.200.000,00	27.634.810.000,00	7.459.610.000,00	136,97
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.721.949.675,69	25.993.613.452,77	(1.728.336.222,92)	93,77
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.387.600.000,00	39.387.600.000,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	101.988.438.600,00	102.539.535.400,00	551.096.800,00	100,54
2	<b>BELANJA</b>	1.000.350.054.060,24	941.402.984.208,11	(58.947.069.852,13)	94,11
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	573.978.115.263,87	543.093.588.455,68	(30.884.526.808,19)	94,62
2.1.1	Belanja Pegawai	366.106.912.735,25	348.256.061.727,00	(17.850.851.008,25)	95,12
2.1.4	Belanja Hibah	8.750.680.000,00	7.967.330.000,00	(783.350.000,00)	91,05
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.521.010.000,00	2.670.000.000,00	(1.851.010.000,00)	59,06
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	164.250.512.926,62	162.284.854.905,68	(1.965.658.020,94)	98,80
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	30.348.999.602,00	21.915.341.823,00	(8.433.657.779,00)	72,21
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	426.371.938.796,37	398.309.395.752,43	(28.062.543.043,94)	93,42
2.2.1	Belanja Pegawai	74.204.132.631,00	71.632.026.503,00	(2.572.106.128,00)	96,53
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	168.975.161.598,77	150.831.954.734,43	(18.143.206.864,34)	89,26
2.2.3	Belanja Modal	183.192.644.566,60	175.845.414.515,00	(7.347.230.051,60)	95,99

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(25.975.617.986,33)	49.235.502.345,95	75.211.120.332,28	(189,55)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	37.523.817.986,33	37.361.479.042,33	(162.338.944,00)	99,57
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37.373.817.986,33	37.360.479.042,33	(13.338.944,00)	99,96
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	150.000.000,00	1.000.000,00	(149.000.000,00)	0,67
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	11.548.200.000,00	11.548.200.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.548.200.000,00	11.548.200.000,00	0,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	25.975.617.986,33	25.813.279.042,33	(162.338.944,00)	99,38
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	75.048.781.388,28	75.048.781.388,28	0,00

Bupati Gunung Mas,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG